

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi faktor penyebab calon penyedia jasa melakukan pendaftaran lelang sebanyak 21 variabel dan calon penyedia jasa tidak memasukan dokumen penawaran sebanyak 58 variabel. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas hanya terdapat 14 calon penyedia jasa melakukan pendaftaran lelang variabel dan 52 variabel calon penyedia jasa tidak memasukan dokumen penawaran yang lolos uji.
2. Hasil analisis faktor calon penyedia jasa melakukan pendaftaran lelang menghasilkan 3 faktor dengan peringkat (1) keuntungan penyedia jasa/perusahaan, (2) hukum dan peraturan, (3) kepentingan pribadi. Sementara faktor yang menyebabkan calon penyedia jasa tidak melakukan pemasukan penawaran menghasilkan 5 faktor dengan peringkat (1) waktu dan informasi pekerjaan, (2) kemampuan penyedia jasa/perusahaan, (3) proses pelelangan dan persekongkolan, (4) lain-lain dan (5) administrasi pelelangan dan LPSE.
3. Hasil analisis korelasi antara rasio pendaftaran dan pemasukan dokumen dan rasio antara harga pemenang dan HPS bahwa terjadi korelasi negatif yang menunjukkan bahwa jika rasio penawaran tinggi maka rasio harga penawaran terhadap HPS menjadi rendah atau sebaliknya.

4. Dampak yang terjadi akibat dari calon penyedia jasa mendaftar tetapi tidak memasukan penawaran yaitu iklim pelelangan kurang kompetitif sehingga akan sulit mencari harga penawaran yang wajar.
5. Solusi yang diusulkan ke pihak pemerintah/pengguna jasa untuk mengurangi dampak dari calon penyedia jasa mendaftar lelang tetapi tidak memasukan dokumen penawaran yaitu :
 - a. Membuat aturan yang mendukung untuk memberikan sanksi yang tegas kepada calon penyedia jasa yang melakukan pendaftaran tetapi tidak memasukan dokumen penawaran.
 - b. Memperbaiki dan menyempurnakan sistem aplikasi LPSE
 - c. Menghindari melakukan pelaksanaan lelang pada saat mendekati tahun anggaran berakhir.
 - d. Melakukan secepatnya proses evaluasi secara transparan, dengan cara menampilkan seluruh hasil evaluasi kedalam *website* pelelangan yang digunakan.
 - e. Membuat gambar teknis yang lengkap sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari calon penyedia jasa. Hal ini dikarenakan sistem penjelasan pelelangan (*aanwijzing*) dilakukan dengan menggunakan percakapan via internet saja sehingga keleluasaan bertanya menjadi sangat terbatas.
 - f. Mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan konstruksi berlangsung, sehingga mengurangi rasa khawatir dari calon penyedia jasa bila dilakukan audit.
 - g. Membuat syarat pelelangan sesederhana mungkin.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap responden penyedia jasa pemborongan. Untuk mengetahui perbedaan variabel yang digunakan antara jasa pemborongan dan jasa konsultasi maka perlu dilakukan penelitian serupa dengan target responden penyedia jasa konsultasi.
2. Dalam penelitian ini menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA). Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan kajian lebih mendalam dengan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA).

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, B. (2010). *Metode dan teknik menyusun tesis*. Edisi Ke-8, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Edisi Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budi, A.S., dan Budi, A.R.S. (2014), "Analisa penyebab kegagalan lelang di dinas pekerjaan umum provinsi kepulauan bangka belitung". Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil, Universitas Diponegoro Semarang
- Eadie, R., Perera, S., Heaney, G., dan Carlisle, J. (2007), "Drivers and barriers to public sector e-procurement within northern ireland's construction industry", *ITcon* 12, 103-120
- Ervianto, W.I. (2002). *Manajemen proyek konstruksi*. Andi, Yogyakarta.
- Ferdian (2014), "Kajian pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi secara elektronik (LPSE) pada unit layanan pengadaan (ULP) provinsi kepulauan bangka belitung". Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Garland, R. (1991), "The mid-point on a rating scale : is it desirable?", *Marketing Bulletin Research Note*, 91(2), 66-67
- Haryati, D., Anditya, A., dan Wibowo, R.A. (2011), "Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada pemerintah kota yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(2), 237- 429
- Jasin, M., Zulaiha, A.R., Rachman, E.J., dan Ariati. N. (2007). *Mencegah korupsi melalui e-procurement: meninjau keberhasilan pelaksanaan e-procurement di pemerintahan Kota Surabaya*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Julita, R., dan Soekiman, A. (2016), "Faktor-faktor penyebab calon penyedia jasa konstruksi melakukan pendaftaran dan tidak melanjutkan memasukan dokumen penawaran". *Jurnal Infrastruktur*, 2 (1) , 6-14
- Komisi Peberantasan Korupsi (KPK). (2011), "*Laporan Tahunan*", (<http://www.kpk.go.id>, diakses tanggal 18 April 2016)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2011), *Majalah Pengadaan Indonesia Kredibel Edisi 01 bulan Oktober 2011–Desember 2011*, (<http://www.khalidmustafa.info>, diakses tanggal 20 Mei 2016)

- Lou, E.W., dan Ashalwi, M. (2009), "Critical success factors for e-tendering implementation in construction collaborative environments: people and process issues", *Journal of Information Technology in Construction*, 14, 98-109
- Martin, J. (2008), "Web-based electronic bidding united kingdom, practical experience", *AACE International Transactions, Proquest Science Journals*, IT 03, 1-10
- Maslani., dan Siswanto. (2011), "Audit pengadaan barang/jasa: mengenal risiko penyimpangan untuk pencegahan", *Jurnal Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 1(1), 58-75
- Nurchana, A.R.M., Haryono, B.S dan Adiono, R. (2014), "Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa: studi terhadap penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 355 -359
- Panayiotou, N.A., Gayaialis, S.P., dan Tatsiopoulos, I.P. (2004), "An e-procurement system for governmental purchasing", *International Journal of Production Economics*, 90, 79–102
- Preston, C.C., dan Colman, A.M. (2000), "Optimal number of response categories in rating scales: reliability, validity, discriminating power, and respondent preferences. *Acta Psychologica*, 104, 1-15
- Raharjo, A.(n.a). "Transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-procurement", *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Rinasari (2010), "Upaya pencegahan persekongkolan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah". Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Santoso, S. (2012). *Aplikasi SPSS pada statistik multivariat*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Saputra, F. (2008), "Kajian penerapan e-procurement pada pengadaan barang dan jasa pemerintah". Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Sharma, S. (1996). *Applied multivariate technique*. John Wiley & Sons, Denvers.
- Soeharto, I. (2001). *Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional*. Erlangga, Jakarta.
- Suhr, D.D. (2013), "Exploratory or Confirmatory factor analysis?", *Statistic and Data Analysis*, Sugi 31, 1-17

- Suraji, A., Suraso, G.W dan Supriyatna, Y. (2009), "The construction sector of Indonesia, Presented at the Asia Construct Conference, CIDB, Kuala Lumpur, Oktober 20-21
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Taurano, G.A. (2013), "Analisis faktor penyebab klaim pada proyek konstruksi yang menggunakan FIDIC conditions of contract for plant and design build". Tesis Jurusan Manajemen Proyek Konstruksi, Universitas Parahyangan Bandung
- Udoyono, K. (2009), "E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota yogyakarta", *Jurnal Studi Pemerintahan UMY*, 3(1), 135 -171
- Wibowo, A. (2014), "Menentukan kewajaran harga penawaran relatif terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS)", *Konferensi Nasional Teknik Sipil*, 8, 253-260
- Widayat., (n.a). "Analisis faktor" (<http://docplayer.info/193616-Analisis-faktor-factor-analysis.html>, diakses tanggal 4 Agustus 2016)
- Wijaya, W.H., Indryani, R., dan Putri, Y.E. (2012), "Studi Penerapan E-Procurement Pada Proses Pengadaan di pemerintah Kota Surabaya, (<http://www.digilib.its.ac.id>, diakses tanggal 5 maret 2016)
- Wirahadikusuma, R.D., (2007), "The Need for Standard Production Information of Indonesian Construction Industry", *European Asian Civil Engineering Forum (EACEF)*, 1(1), 102 – 108
- ____, (1999). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi
- ____, (2008). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- ____, (2003) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- ____, (2007). Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007, tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah
- ____, (2010). Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- ____, (2014). Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Perppres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah

- ___, (2015) Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- ___, (2011). Peraturan Menteri PU Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- ___, (2015). Peraturan kepala LKPP No. 9 Tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik